

PRESS BRIEF

DISKUSI PUBLIK INDEF - 5 September 2024 “Ekonomi Politik Persaingan Pilkada 2024”

Poin 1: Calon Tunggal di 41 Pilkada: Perludem Minta Revisi UU Pilkada Masukkan Batas Atas Dukungan

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khoirunnisa Nur Agustyati, menyatakan kekhawatirannya pada Pilkada 2024 yang diselenggarakan pada tahun yang sama dengan pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg) sehingga terdapat kecenderungan untuk menerapkan koalisi nasional pada tingkat pemerintah. Bahkan, setelah perpanjangan, masih terdapat 41 pilkada dengan calon tunggal dan banyak pemilihan kepala daerah (pilkada) dengan salah satu paslon memborong dukungan partai politik sehingga membentuk koalisi besar dengan suara pileg melebihi 50 %.

Pada diskusi “Ekonomi Politik Pilkada 2024” yang diselenggarakan INDEF (*Institute for Development of Economics and Finance*), perempuan lulusan program Magister Politik UI itu menambahkan, walau keputusan MK nomor 60/2024 menurunkan batas dukungan pasangan pasangan calon (paslon) di pilkada menjadi 6-10 % serta membuka pintu partai non parlemen untuk mengusung paslon di pilkada, tapi revisi UU Pilkada berikutnya perlu memasukkan batas atas/maksimal dukungan paslon di pilkada (5/9/2024)

Pada acara yang sama, **Berly Martawardaya sebagai Direktur Riset INDEF** memaparkan hasil kajian lembaganya dengan menerapkan kerangka analisis ekonomi persaingan usaha pada pilkada 2024 bahwa pada pemilihan gubernur (pilgub) Jakarta, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan, biarpun terdapat dua paslon, tapi satu paslon didukung lebih dari 75 % suara pileg dan pilkadanya memiliki Indeks Persaingan lebih dari 6000. Angka tersebut berarti melebihi 1,5 kali batas yang diterapkan KPPU untuk persaingan usaha. Hal serupa terjadi pada pemilihan bupati di Jember dan Bogor sehingga banyak pilkada memiliki persaingan yang tidak sehat.

Pria yang sering mengajar mata kuliah Ekonomi Politik dan Persaingan Usaha di Universitas Indonesia menyampaikan bahwa banyak kemiripan antara persaingan usaha dan persaingan politik, tapi regulasi di persaingan politik lebih sedikit dan longgar. Padahal, dampak dari rendahnya pilihan dan persaingan akan terasa pada pembangunan daerah tersebut selama lima tahun ke depan.

Berly menutup paparan dengan mengajak para akademisi dan aktivis untuk menyiapkan kerangka dan regulasi untuk persaingan politik yang lebih sehat di 2019 sejak dini supaya bonus demografi Indonesia tidak tersia-siakan.

Poin 2. INDEF: Oligarki Partai di Pilkada Tidak sehat untuk Pembangunan Ekonomi

Setelah penutupan perpanjangan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan bahwa terdapat 41 kontestasi dengan hanya satu pasangan calon dari Pilkada di 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota se-Indonesia. Pilkada 2024 akan berlangsung dengan satu paslon di berbagai daerah dengan didukung koalisi gemuk partai-partai politik yang mengantongi lebih dari 50% suara sah dari pileg.

Berly Martawardaya, Direktur Riset INDEF (*Institute for Development of Economics and Finance*) memaparkan hasil kajian lembaganya yang menerapkan kerangka analisis ekonomi persaingan usaha untuk mengkalkulasi kesehatan persaingan serta konsentrasi dukungan terhadap paslon di Pilkada 2024.

Penelitian INDEF menemukan pada pilgub Jakarta, Sumatra Utara, dan Sulawesi Selatan 2024 biarpun terdapat dua paslon tapi satu paslon didukung lebih dari 75 % suara pileg dan pilkadanya memiliki Indeks Persaingan lebih dari 6000 yang berarti melebihi 1,5 kali batas yang diterapkan KPPU untuk persaingan usaha. Hal serupa terjadi pada pemilihan bupati di Jember dan Bogor. Persaingan pilkada pada tingkat kota cenderung lebih sehat daripada kabupaten dan provinsi.

Pria yang sering mengajar mata kuliah Ekonomi Politik dan Persaingan Usaha di Universitas Indonesia menyampaikan bahwa banyak kemiripan antara persaingan usaha dan persaingan politik tapi regulasi di persaingan politik lebih sedikit dan longgar. Padahal, pilkada adalah ajang para calon kepala daerah untuk menawarkan gagasan dan arah pembangunan daerah lima tahun ke depan pada konstituen. Sedikitnya pilihan akibat oligarki dan kolusi partai di pilkada tidak sehat bagi pembangunan ekonomi daerah tersebut. (5/9/2024)

Pada acara yang sama **Aditya Perdana, Pengajar Ilmu Politik UI dan Direktur Eksekutif Algoritma Research and Consulting menyatakan bahwa**, kompetisi dalam Pilkada 2024 relatif tidak sehat karena masih didominasi oleh kekuatan koalisi partai politik yang dominan di pusat. Kompetisi yang terbuka dan lebih sehat perlu terus didorong bagi perkembangan demokrasi lokal. Penguatan demokrasi dapat dilakukan dalam Pilkada 2029 bila masyarakat sipil konsisten mendorong revisi UU Pilkada dari sekarang.

Poin 3. Ekonomi Politik Persaingan Pilkada 2024

Setelah penutupan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan bahwa terdapat 41 kontestasi dengan hanya satu pasangan calon dari Pilkada di 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota se-Indonesia. Banyak Pilkada 2024 akan berlangsung dengan satu paslon didukung koalisi gemuk partai-partai politik yang mengantongi lebih dari 50% suara sah dari pemilu legislatif (pileg). Padahal, pilkada adalah ajang para calon kepala daerah untuk menawarkan gagasan dan arah pembangunan daerah lima tahun mendatang kepada konstituen. Amartya Sen, peraih Nobel Ekonomi pertama dari Asia menyatakan bahwa indikator penting pembangunan adalah bertambahnya pilihan.

Pada persaingan ekonomi, terdapat regulasi yang ketat dan Komite Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merupakan institusi penjaga persaingan usaha yang sehat di Indonesia. Tapi, bagaimana dengan kesehatan persaingan politik? Politik yang oligarkis dan menjauh dari aspirasi rakyat ketika Indonesia hadapi persaingan global yang ketat dan bonus demografi akan menyulitkan peningkatan daya saing.

Berly Martawardaya - Direktur Riset INDEF: UU no 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menerapkan batas 75 % *market share* sebagai limit oligopoli di suatu produk tertentu. KPPU menggunakan Hirsch-Herfindahl Index (HHI) yang menghitung konsentrasi dan persaingan usaha dimana merger/akuisisi yang menghasilkan konsentrasi pasar tinggi dengan Index HHI>4000 akan ditolak. *Rapid assesment* yang dilakukan INDEF menemukan bahwa pilgub Jakarta, Sumatra Utara, dan Sulawesi Selatan, biarpun terdapat 2 paslon, tapi satu paslon didukung lebih dari 75 % suara masuk pileg dan pilkadanya memiliki Index HHI lebih dari 6000 yang berarti lebih dari 1,5 kali batas yang diterapkan KPPU untuk persaingan usaha yang sehat. Hal serupa terjadi pada pemilihan bupati di Jember dan Bogor. Artinya, pada banyak pilkada, persaingannya masih tidak sehat

Aditya Perdana – Pengajar Ilmu Politik UI dan Direktur Eksekutif Algoritma Research and Consulting: Kompetisi dalam Pilkada 2024 relatif tidak sehat karena masih didominasi oleh kekuatan koalisi partai politik yang dominan di pusat. Kompetisi yang terbuka memang perlu terus didorong bagi perkembangan demokrasi lokal kita. Mudah-mudahan bisa kita lakukan dalam Pilkada berikutnya dengan syarat tentunya perlu revisi UU Pilkada setelah 2024 usai. Ia mengambil contoh dari seringnya kotak kosong di Pilkada secara historis hingga saat ini, yang mana menurutnya hal ini semakin prevalen apabila pada daerah terkait terdapat *incumbent* yang kuat. Selain itu, *political cost* dari seluruh proses pemilu menjadikan kandidat ragu untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

Khoirunnisa Nur Agustyati – Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem): Kondisi Pilkada pada tahun ini tidak ideal karena dilaksanakan pada tahun yang sama dengan Pemilu presiden dan legislatif. Keputusan MK No.60 dan No.70 tahun 2024 ini belum dimanfaatkan secara maksimal oleh partai politik. Meskipun KPU telah perpanjang pendaftaran, upaya pengubahan pengusungan koalisi ini terhambat oleh KPU sendiri yang menyaratkan koalisi salah satu partai alihkan dukungan. Khoirunnisa mendorong perlunya batas atas maksimal pada revisi UU Pilkada berikutnya supaya persaingan politik lebih sehat.

Narahubung: **Gading (0822-7271-8624)**